

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang sangat produktif dan memainkan peran krusial dalam memperkuat fondasi pembangunan nasional. Keberadaannya sangat diperlukan, yang ditandai oleh keterbatasan modal usaha, jumlah tenaga kerja yang relatif kecil, serta cakupan pasar yang umumnya berskala lokal. Badan Pusat Statistik (2023), melalui laporan Profil Industri Mikro dan Kecil, menjelaskan bahwa UMKM tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berperan sebagai sarana pemerataan kesempatan berusaha, peningkatan kesejahteraan, serta instrumen strategis dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Karakteristik UMKM yang fleksibel dan adaptif membuat sektor ini cenderung mampu bertahan dalam kondisi krisis ekonomi, terutama ketika perusahaan berskala besar menghadapi tekanan usaha. Oleh karena itu, UMKM menempati posisi yang sangat penting dan tidak tergantikan dalam sistem perekonomian Indonesia, baik dari perspektif ekonomi maupun sosial. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional menunjukkan tingkat signifikansi yang tinggi. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik bersama Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tercatat secara konsisten melebihi 60 persen dengan nilai tambah ekonomi yang mencapai lebih dari Rp9.580 triliun pada periode penghitungan terakhir.

Publikasi Badan Pusat Statistik juga mencatat bahwa lebih dari 99 persen unit usaha di Indonesia tergolong dalam kategori UMKM, dengan jumlah mencapai sekitar 30,18 juta unit hingga tahun 2024. Dominasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi di Indonesia masih bergantung pada usaha berskala mikro, kecil, dan menengah. Oleh karena itu, keberlanjutan dan penguatan sektor UMKM menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas serta mengarahkan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, sebaran UMKM yang mencakup sektor perdagangan, pertanian, industri rumah tangga, hingga ekonomi kreatif menjadikan sektor ini sebagai cerminan nyata dinamika ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.

Selain memberikan kontribusi terhadap PDB, UMKM juga memiliki peran strategis dalam penyerapan tenaga kerja. Badan Pusat Statistik, 2016, melalui hasil Sensus Ekonomi Lanjutan melaporkan bahwa UMKM mampu menyerap lebih dari 59 juta tenaga kerja non-pertanian dengan rata-rata dua orang pekerja pada setiap unit usaha. Jumlah tersebut jauh melampaui daya serap tenaga kerja pada perusahaan berskala besar yang umumnya membutuhkan kualifikasi tertentu. Karakter UMKM yang bersifat inklusif memungkinkan sektor ini membuka kesempatan kerja bagi masyarakat dengan beragam latar belakang pendidikan, usia, dan keterampilan. Kondisi ini menempatkan UMKM tidak hanya sebagai penggerak perekonomian, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang berperan penting dalam menekan tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

Kebijakan harga merupakan salah satu keputusan strategis yang berperan sebagai penghubung antara produk yang ditawarkan dengan konsumen melalui mekanisme nilai tukar di pasar. Pada UMKM sektor makanan, penetapan harga menjadi aspek yang sangat krusial karena secara langsung memengaruhi daya beli konsumen sekaligus menentukan besaran margin keuntungan yang dapat diperoleh pelaku usaha. Kotler dan Keller, 2016, menjelaskan bahwa kebijakan harga dapat Penetapan harga dalam konteks UMKM dapat dievaluasi melalui tiga pendekatan utama. Pertama, penetapan harga berbasis biaya (cost-based pricing), yang ditentukan berdasarkan total biaya produksi ditambah margin keuntungan. Kedua, penetapan harga berbasis pasar (market-based pricing), yang mempertimbangkan tingkat persaingan serta harga pesaing. Ketiga, penetapan harga berbasis nilai (value-based pricing), yang berfokus pada persepsi nilai produk di mata konsumen. Dalam praktiknya, pelaku UMKM di sektor makanan sering menghadapi dilema penetapan harga. Harga yang terlalu tinggi berpotensi menurunkan daya beli konsumen, sedangkan harga yang terlalu rendah dapat mengurangi profitabilitas usaha.

Perbedaan kondisi pasar antarwilayah semakin memperkuat pentingnya strategi harga yang adaptif. Badan Pusat Statistik (2024), melalui publikasi Harga Konsumen Beberapa Barang Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau di 150 Kabupaten/Kota di Indonesia, menunjukkan adanya variasi harga pangan yang cukup signifikan di berbagai daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaku UMKM perlu menyesuaikan kebijakan harga dengan karakteristik pasar lokal agar tetap mampu bersaing dan mempertahankan pangsa pasar. Selain kebijakan harga, efisiensi operasional juga menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan usaha. Efisiensi operasional

Efisiensi merujuk pada kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, sehingga menghasilkan output maksimal dengan biaya yang serendah mungkin. (Heizer et al., 2017), menyatakan bahwa efisiensi operasional dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain produktivitas tenaga kerja, efisiensi penggunaan bahan baku, pengendalian biaya produksi, serta pemanfaatan teknologi dalam mempercepat proses produksi dan distribusi. (Heizer et al., 2017) turut menekankan bahwa pengendalian biaya produksi melalui sistem akuntansi manajemen yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran perusahaan mampu memberikan nilai tambah bagi kinerja keuangan usaha.

Badan Pusat Statistik, 2023, melalui publikasi Statistik Penyediaan Makanan dan Minuman melaporkan bahwa total pengeluaran usaha pada sektor penyediaan makanan dan minuman mencapai Rp601,21 triliun, sementara nilai penjualannya tercatat sebesar Rp998,37 triliun. Tingginya proporsi biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan tersebut menunjukkan masih terbukanya peluang bagi pelaku UMKM sektor makanan untuk meningkatkan efisiensi operasional guna memperkuat kinerja keuangan usaha. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengendalian biaya dan optimalisasi penggunaan sumber daya menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan agar margin keuntungan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Kinerja keuangan menggambarkan tingkat keberhasilan suatu entitas bisnis dalam mengelola sumber daya ekonomi guna mencapai tujuan profitabilitas dan kelangsungan operasional. (Heizer et al., 2017), menjelaskan bahwa kinerja keuangan dapat diukur

melalui empat indikator utama, Indikator-indikator tersebut meliputi profitabilitas, yang menunjukkan kemampuan usaha dalam menghasilkan laba, likuiditas, yang menggambarkan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek solvabilitas, yang mencerminkan kapasitas perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya dengan aset yang dimiliki, serta pertumbuhan penjualan, yang mengindikasikan peningkatan pendapatan dari waktu ke waktu. Indikator-indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana kondisi keuangan suatu usaha berada dalam keadaan sehat dan berkelanjutan.

Sejalan dengan pandangan tersebut, (Putri et al., 2021.), menegaskan bahwa kinerja keuangan merupakan instrumen utama dalam menilai efektivitas manajemen dalam mengelola aset, kewajiban, dan modal usaha. Data Survei Khusus Industri Mikro Kecil Badan Pusat Statistik, 2023, menunjukkan bahwa hanya sekitar 30,18% usaha mikro dan kecil yang mengalami peningkatan laba, sementara 40,85% berada pada kondisi relatif stabil dan 22,27% justru mengalami penurunan kinerja. Temuan ini mengindikasikan adanya perbedaan kemampuan pengelolaan keuangan di antara pelaku UMKM, Faktor-faktor tersebut memiliki dampak langsung terhadap pencapaian kinerja keuangan setiap usaha. Oleh karena itu, kinerja keuangan UMKM sektor makanan, termasuk di Kabupaten Bangkalan, sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengombinasikan kebijakan harga yang tepat dengan tingkat efisiensi operasional yang optimal.

Namun demikian, pengaruh kebijakan harga dan efisiensi operasional terhadap kinerja keuangan tidak selalu menunjukkan hasil yang konsisten pada setiap usaha. Salah

satu faktor yang dapat memperkuat atau bahkan memperlemah hubungan tersebut adalah pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan mencakup kegiatan perencanaan, pencatatan, pengawasan, serta evaluasi keuangan yang berperan penting dalam menjaga efisiensi dan stabilitas keuangan usaha. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, keputusan terkait penetapan harga maupun pengendalian biaya operasional dapat diambil secara lebih rasional dan berbasis data. Sartika dan Yuliana, 2021, menemukan bahwa kemampuan pengelolaan keuangan mampu memperkuat hubungan antara strategi operasional dan kinerja keuangan, khususnya pada usaha kecil yang masih mengandalkan modal internal dan sistem manajemen yang sederhana.

Mengacu pada data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, 2024, jumlah UMKM di Pulau Madura tersebar di empat kabupaten, yaitu Kabupaten Bangkalan sebanyak 83.502 unit, Kabupaten Sampang 64.317 unit, Kabupaten Pamekasan 71.205 unit, dan Kabupaten Sumenep 94.210 unit. Data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bangkalan menempati posisi kedua dengan jumlah UMKM terbanyak setelah Kabupaten Sumenep. Meskipun memiliki jumlah pelaku usaha yang relatif besar, tingkat produktivitas dan efisiensi UMKM di Bangkalan masih tergolong rendah dibandingkan dengan wilayah lain. Di sisi lain, posisi geografis Kabupaten Bangkalan yang strategis sebagai pintu gerbang perekonomian antara Pulau Madura dan Kota Surabaya melalui Jembatan Suramadu menjadikan wilayah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM, khususnya pada sektor makanan.

Meskipun UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah, sebagian besar pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait efisiensi operasional dan pengelolaan keuangan yang cenderung masih sederhana. Kondisi tersebut menunjukkan perbedaan dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain di Pulau Madura, seperti Sumenep dan Pamekasan, yang relatif lebih stabil dalam penerapan tata kelola usaha. Oleh karena itu, Kabupaten Bangkalan menjadi lokasi yang relevan untuk diteliti guna menganalisis pengaruh kebijakan harga dan efisiensi operasional terhadap kinerja keuangan UMKM, dengan pengelolaan keuangan sebagai variabel moderasi yang berpotensi memperkuat hubungan antarvariabel tersebut. Pemilihan Desa Telang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik wilayahnya sebagai salah satu pusat pertumbuhan UMKM sektor makanan di Kabupaten Bangkalan. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah pelaku usaha yang terjadi dari tahun ke tahun. Namun demikian, sebagian besar UMKM di Desa Telang masih menghadapi keterbatasan dalam pengelolaan keuangan serta pengendalian biaya operasional. Kondisi tersebut menjadikan Desa Telang relevan sebagai objek penelitian dalam mengkaji permasalahan kinerja keuangan UMKM secara lebih mendalam.

Fenomena tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM sektor makanan yang beroperasi di wilayah Bangkalan, terutama dalam menentukan kebijakan harga yang mampu menjaga margin keuntungan tanpa mengurangi daya beli konsumen. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah daerah berupaya meningkatkan peran UMKM melalui berbagai program pembinaan, salah satunya dengan melakukan pendataan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendataan ini menjadi langkah strategis untuk

memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi, potensi, serta permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha, sehingga kebijakan yang dirumuskan dapat lebih tepat sasaran dalam mendorong peningkatan kinerja dan keberlanjutan UMKM (PL-KUMKM) menjadi langkah penting untuk memperoleh gambaran riil kondisi UMKM di lapangan. Data yang akurat diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan program intervensi, seperti pelatihan manajerial, fasilitasi produksi, serta peningkatan literasi keuangan. Namun pada kenyataannya, potensi besar UMKM sektor makanan di Bangkalan belum sepenuhnya diimbangi dengan kinerja keuangan yang sehat maupun kemampuan adaptasi terhadap dinamika pasar. Banyak pelaku usaha masih menjalankan kegiatan usahanya secara tradisional, dengan biaya produksi yang relatif tinggi, saluran pemasaran yang terbatas, serta strategi harga yang belum disesuaikan dengan kondisi pasar lokal dan tingkat efisiensi operasional yang optimal. Kondisi tersebut menjadi hambatan dalam meningkatkan margin keuntungan, memperluas basis konsumen, dan menjaga keberlanjutan usaha.

Kebijakan harga memiliki peranan yang signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM, karena keputusan penetapan harga secara langsung memengaruhi tingkat daya saing usaha serta besaran laba yang dapat dicapai. (Ni Luh De Erik Trisnawati & Luh Puspita Dewi, 2024) mengemukakan bahwa penerapan strategi penetapan harga yang tepat mampu meningkatkan kinerja keuangan UMKM sektor kuliner, khususnya melalui keselarasan antara harga jual, daya beli konsumen, dan margin keuntungan yang dihasilkan. Sejalan dengan temuan tersebut, harga merupakan salah satu instrumen utama

yang menentukan tingkat pendapatan dan profitabilitas suatu perusahaan (Kotler & Keller, 2016)

Selain kebijakan harga, efisiensi operasional juga memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM. Efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, pengendalian biaya produksi, serta penerapan teknologi yang sesuai dapat mendorong peningkatan profitabilitas UMKM secara berkelanjutan (Heizer et al., n.d.). Pengendalian biaya secara efektif melalui peningkatan efisiensi operasional tidak hanya menciptakan nilai tambah bagi usaha, tetapi juga dengan demikian, kebijakan harga dan efisiensi operasional dapat dipandang sebagai dua faktor strategis yang secara empiris berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM (Ismawati, 2024). Oleh karena itu, pengujian empiris mengenai pengaruh kebijakan harga dan efisiensi operasional terhadap kinerja keuangan, dengan mempertimbangkan pengelolaan keuangan sebagai variabel moderasi, menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan pada UMKM sektor makanan di Desa Telang, Kabupaten Bangkalan, pada periode 2023–2024. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana pengelolaan keuangan mampu memperkuat hubungan antara kebijakan harga, efisiensi operasional, dan kinerja keuangan usaha.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kinerja UMKM, hasil yang diperoleh masih menunjukkan ketidakkonsistenan temuan. Kebijakan harga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja penjualan UMKM (Umar, 2022) Sebaliknya, Efisiensi operasional

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (Saputra et al., 2024). Perbedaan hasil penelitian tersebut mengindikasikan adanya celah penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dengan mempertimbangkan karakteristik spesifik UMKM sektor makanan di Kabupaten Bangkalan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian peran pengelolaan keuangan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kebijakan harga dan efisiensi operasional terhadap kinerja keuangan UMKM. Pendekatan moderasi tersebut masih relatif jarang digunakan dalam penelitian UMKM, khususnya pada konteks sektor makanan di tingkat lokal, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan empiris yang lebih mendalam, terutama pada konteks UMKM sektor makanan di wilayah pedesaan seperti Kabupaten Bangkalan.

Keberadaan UMKM sektor makanan di Kabupaten Bangkalan tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu pilar ketahanan ekonomi daerah. Namun demikian, banyak pelaku usaha masih menghadapi kesulitan dalam merumuskan kebijakan harga yang kompetitif, sekaligus harus berhadapan dengan tingginya biaya operasional yang menekan margin keuntungan. Tanpa strategi harga dan efisiensi operasional yang tepat, kinerja keuangan UMKM berpotensi mengalami stagnasi bahkan penurunan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar penyusunan rekomendasi praktis bagi pelaku UMKM, khususnya dalam merumuskan kebijakan harga yang responsif terhadap perubahan

kondisi pasar, serta dalam menerapkan strategi efisiensi operasional yang efektif guna menekan pemborosan sumber daya dan meningkatkan kinerja keuangan usaha.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian manajemen keuangan UMKM melalui pengembangan kerangka analisis yang mengintegrasikan variabel kebijakan harga dan efisiensi operasional dalam satu model penelitian. Selama ini, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menganalisis kedua variabel tersebut secara terpisah atau mengaitkannya dengan variabel nonkeuangan. Akibatnya, implikasi keduanya terhadap keberlanjutan kinerja keuangan UMKM belum tergambarkan secara komprehensif.. Selain itu, aspek kebaruan penelitian ini juga terletak pada fokus lokasi penelitian, yaitu Desa Telang di Kabupaten Bangkalan, yang hingga saat ini masih relatif terbatas mendapat perhatian akademik meskipun memiliki potensi ekonomi yang cukup besar di wilayah Madura. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya mengisi kekosongan kajian empiris sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat lokal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan harga berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah efisiensi operasional berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

3. Apakah pengelolaan keuangan dapat memoderasi pengaruh antara kebijakan harga terhadap kinerja keuangan?
4. Apakah pengelolaan keuangan dapat memoderasi pengaruh antara efisiensi operasional terhadap kinerja keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan harga terhadap kinerja keuangan.
2. Untuk menganalisis pengaruh efisiensi operasional terhadap kinerja keuangan.
3. Untuk menganalisis peran pengelolaan keuangan dalam memoderasi pengaruh antara kebijakan harga terhadap kinerja keuangan.
4. Untuk menganalisis peran pengelolaan keuangan dalam memoderasi pengaruh antara efisiensi operasional terhadap kinerja keuangan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut::

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen, khususnya dalam bidang manajemen keuangan dan manajemen UMKM. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya

literatur empiris terkait faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan UMKM, terutama pada konteks usaha di wilayah pedesaan seperti Kabupaten Bangkalan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

- a. Bagi pelaku UMKM sektor makanan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya penetapan kebijakan harga yang tepat, peningkatan efisiensi operasional, serta penerapan pengelolaan keuangan yang baik dalam meningkatkan dan memperkuat kinerja keuangan usaha.
- b. Bagi pemerintah daerah atau instansi pembina UMKM, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang program pendampingan, pembinaan, dan pelatihan yang berfokus pada peningkatan kemampuan manajerial UMKM, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan dan efisiensi biaya operasional..
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan dasar pengembangan penelitian lebih lanjut yang mengkaji hubungan antarvariabel manajerial dan keuangan pada UMKM di berbagai sektor maupun wilayah yang berbeda.